



ANALISIS ISU DAN MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN KUDUS

Muh Rafi Alfaris

Institut Agama Islam Negeri Kudus

rafialfaris@ms.iainkudus.ac.id

Abstrak

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Tulisan berikut ini akan mengupas lebih dalam tentang isu-isu dan masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kudus. Studi yang dilakukan dalam riset ini menggunakan metode riset literatur. Hasil riset ini menjelaskan bahwa pertama, pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan membangun negara maju dengan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah. Namun, kegagalan pembangunan sering kali berakar dari masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif. Kedua, pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, SDGs, krisis ekonomi global, ekonomi ramah lingkungan, bencana alam, dan pengendalian ruang hijau. Ketiga, solusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus melibatkan pemberian otonomi khusus kepada daerah. Diversifikasi ekonomi, pelatihan kerja, peningkatan infrastruktur, inovasi, dan transparansi dalam kebijakan pembangunan adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata kunci: Isu, Kudus, Masalah, Pembangunan Ekonomi

Abstract

In Indonesia's economic development, there are several issues and challenges that need to be addressed to achieve the desired progress. The following paper will explore in more depth the issues and problems of economic development that occur in Kudus Regency. The study conducted in this research uses the literature research method. The results of this research explain that first, national development aims to improve welfare and build a developed country with community participation and government support. However, development failures often stem from structural problems that require comprehensive solutions. Second, economic development in Kudus Regency is influenced by the Covid-19 Pandemic, SDGs, global economic crisis, environmentally friendly economy, natural disasters, and green space control. Third, the solution to improving economic development in Kudus Regency involves granting special autonomy to the regions. Economic diversification, job training, infrastructure improvement, innovation, and transparency in development policies are the key steps to achieve the goal.

Keyword: Issues, Kudus, Problems, Economic Development

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memiliki kontrol lebih besar dalam mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri (Ningsih & Alaydrus, 2022; Permatasari *et al.*, 2023; Ayu *et al.*, 2024). Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendanai program-program pembangunan yang dianggap prioritas (Giroth *et al.*, 2022; Desembrianita *et al.*, 2024; Azra & Afif, 2024). Hal ini memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun telah tercapai kemajuan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan (Giroth *et al.*, 2022; Henderson & Loreau, 2023; Fauziah *et al.*, 2024). Salah satu tujuan utama pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap layanan publik, distribusi sumber daya, dan kesempatan ekonomi di berbagai daerah (Panggarti *et al.*, 2022; Dienes, 2023; Permana *et al.*, 2024). Selain itu, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga masih memerlukan perhatian lebih dalam implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah.

Pembangunan yang dilakukan di Republik Indonesia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Simamora & Sarjono, 2022; Pelengkahu & Satria, 2023; Aziz & Najicha, 2024). Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat kecerdasan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Munasaroh, 2022; Hickmann *et al.*, 2023; Amri & Lessy, 2024). Dengan demikian, pembangunan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik guna mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan (Putri & Putri, 2022; Efendi, 2023; Dewi & Ramadhan, 2024).

Pembangunan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kabupaten Kudus, terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi ekonomi yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari naskah ini adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap isu dan masalah yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut dan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemilihan topik ini didasari oleh pentingnya pemahaman terhadap dinamika pembangunan ekonomi pada Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus memiliki beberapa sektor ekonomi yang menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan, seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan sektor jasa. Namun, esensial untuk mengidentifikasi isu dan tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing Kabupaten Kudus di era globalisasi. Hal ini mendesak karena diperlukan kebijakan yang tepat untuk meratakan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi disparitas antarwilayah. Riset ini bertujuan untuk menemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional, di mana mengakibatkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek masyarakat. Transformasi ini mencakup perubahan dalam sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta struktur ekonomi itu sendiri (Lase *et al.*, 2024; Solechah & Sugito, 2023; Azim *et al.*, 2022). Dalam hal ini, dapat teridentifikasi menjadi 5 tahap dalam proses pembangunan, yaitu: masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk tinggal landas, fase tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan akhirnya, masa konsumsi yang tinggi.

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses evolusi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus melestarikan lingkungan dan kondisi sosial, demi memberikan manfaat yang optimal bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang (sofyan Nasution *et al.*, 2024; Diaz *et al.*, 2023; Meilina & Oktavian, 2022). Proses ini mencakup integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga setiap langkah pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berupaya menciptakan sistem yang efisien dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang sama.

Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2002, di Johannesburg, diadakan Konferensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbarui komitmen internasional terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, disetujui rencana Johannesburg yang berfokus pada pengintegrasian nilai-nilai keberlanjutan ke dalam praktik pembangunan (Andris *et al.*, 2024; Mangukiya & Sklarew, 2023; Hidayat & Husni, 2022). Kesepakatan ini mencerminkan penerapan pendekatan yang menitikberatkan pada 3 pilar utama dari pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

1. Pilar Ekonomi

Walaupun pembangunan berkelanjutan menantang paradigma ekonomi yang ada, sebuah perusahaan harus tetap memiliki kelayakan ekonomi untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Tantangan yang dihadapi adalah menemukan keseimbangan antara penciptaan nilai dan pelestarian sumber daya. Pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi faktor keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Membayar harga yang adil di seluruh rantai pasokan, mendukung ekonomi lokal, serta menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon merupakan tindakan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi dan dihargai oleh seluruh ekosistem.

2. Pilar Lingkungan

Pilar utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Perusahaan yang bertanggung jawab berupaya untuk mengurangi jejak ekologis mereka dan berkontribusi dalam memerangi pemanasan global. Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan bervariasi tergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan, meliputi ekonomi sirkular, desain yang ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan baku, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih efisien, pelestarian keanekaragaman hayati, dan berbagai inisiatif lainnya.

3. Pilar Sosial

Pilar sosial dari pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan berkontribusi terhadap pemenuhannya. Hal ini menjadi landasan bagi tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) berkomitmen untuk mengurangi dampak sosial dari aktivitas mereka, menjamin kesejahteraan karyawan, serta menghadapi tantangan terkait keragaman dan inklusi. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 memberikan panduan dan arah bagi tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

METODE

Studi yang dilakukan dalam riset ini menggunakan metode riset literatur. Metode riset literatur merupakan salah satu pendekatan dalam studi akademis dimana peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data dari sumber-sumber literatur yang ada, seperti jurnal, buku, artikel, dan publikasi lainnya untuk menjawab pertanyaan riset yang spesifik (Adlini *et al.*, 2022; Nasution, 2023; Alfaisal *et al.*, 2024). Proses ini melibatkan pencarian kata kunci yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek, mengidentifikasi tren, dan kesenjangan dalam riset yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intrepretasi Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses transformasi yang dimulai dari kondisi nasional tertentu menuju kondisi nasional yang lebih baik (Hasibuan & Harahap, 2022; Kuzmak & Kuzmak, 2023; Candra *et al.*, 2024). Tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk mencapai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terencana, menyeluruh, dan bersifat nasional guna menciptakan kehidupan yang sejajar dan setara dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju (Uksan, 2023; Alfariis, 2024). Dengan demikian, pembangunan nasional sebenarnya mencerminkan keinginan dan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun negara yang maju dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam implementasi pembangunan bersama pemerintah, partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan memiliki peran yang sangat vital (Sutrisna, 2022; Aini *et al.*, 2023; Alfariis & Rosyid, 2024). Masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling berperan dalam proses pembangunan, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu, kerjasama antara kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah yang saling mendukung, melengkapi, dan bersinergi sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional secara bersama-sama (Weningtyas & Widuri, 2022; Song & Jang, 2023; Ardiansyah *et al.*, 2024).

Kegagalan pembangunan nasional tidak hanya disebabkan oleh ketidaktersediaan pelaksanaan yang terstruktur di lapangan, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu masalah yang bermula dari akar permasalahan (Rumkabu, 2022; Taiwo *et al.*, 2023; Alfariis, 2024). Keberadaan geografi Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan transportasi yang masih terbatas dan belum optimal menjadi indikasi bahwa pembangunan di Indonesia belum merata (Lestianto *et al.*, 2022; Madubun, 2023; Rahim *et al.*, 2024). Kondisi ini menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Mobilitas dan pertukaran barang dan jasa di Jawa Tengah, khususnya di Kudus, sangat bergantung pada infrastruktur transportasi darat yang tersedia. Hal ini merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Menurut PerDa Kab Kudus No 1 Tahun 2018-2023 mengenai RPJMD Kab Kudus Tahun 2018-2023, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah Kabupaten Kudus. Permasalahan tersebut antara lain: *Pertama*, Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. *Kedua*, Kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha. *Ketiga*, Tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. *Keempat*, Perlunya peningkatan daya saing daerah. *Kelima*, Tantangan dalam menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Naskah Akademik RPJMD Kab Kudus Tahun 2018-2023, konsep menyeluruh terhadap berbagai permasalahan pembangunan di daerah Kudus menjadi fokus penting untuk diperhatikan dan diteliti lebih lanjut, mengingat adanya sejumlah realitas yang perlu dipahami, antara lain: *Pertama*, Konsep pembangunan berkelanjutan dengan adanya pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam. *Kedua*, Konsep pemerataan dan keadilan dengan adanya pemerataan dan keadilan menjadi landasan dalam pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. *Ketiga*, Konsep partisipasi masyarakat dengan adanya partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. *Keempat*, Konsep kemandirian daerah dengan adanya kemandirian daerah menjadi fokus dalam upaya meningkatkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Tujuannya adalah agar Kabupaten Kudus dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini sangat penting karena dalam UU No 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan situasi konkret terkait RPJMD di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala utama dalam akselerasi pembangunan daerah Kabupaten Kudus, yakni: *Pertama*, Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. *Kedua*, Kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Ketiga*, Tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. *Keempat*, Perlunya peningkatan daya saing daerah yang menjadi penting dalam menghadapi persaingan global dan menarik investasi, serta *Kelima*, Tantangan dalam menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan PemDa yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

Intrepretasi Isu dan Masalah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kudus

Dalam konteks skala internasional, isu strategis memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Kudus, terutama dalam konteks Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai kebijakan pembangunan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif di tengah situasi pandemi ini. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis internasional lain yang juga berdampak pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, seperti:

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi perubahan pasca MDGs tahun 2015, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti depleksi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin kritis, perlindungan sosial, keamanan pangan dan energi, serta pembangunan yang inklusif bagi kaum miskin. Konsep pengembangan SDGs memiliki tiga pilar indikator utama, yakni: *Pertama*, pembangunan manusia (*Human Development*) seperti pendidikan dan kesehatan; *Kedua*, pembangunan ekonomi sosial (*Social Economic Development*) termasuk ketersediaan infrastruktur lingkungan dan pertumbuhan ekonomi; *Ketiga*, pembangunan lingkungan (*Environmental Development*) yang mencakup ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

2. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah kondisi di mana terjadi penurunan ekonomi secara meluas di seluruh dunia yang berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Krisis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan pasar keuangan, penurunan investasi, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada ekspor dan investasi asing, krisis ekonomi global merupakan ancaman serius. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, nilai tukar mata uang, dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi dan mengatasi dampak dari krisis ekonomi global.

3. Penerapan ekonomi ramah lingkungan (*Green Economic Global*)

Dapat diberlakukan dengan berbagai cara, antara lain: *Pertama*, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Didukung dengan adanya adopsi kebijakan dan program-program pro lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam di daerah menawan. *Kedua*, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Didukung dengan adanya investasi dalam teknologi dan ramah lingkungan untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, berupa bank sampah serta sistem mendaur ulangnya. *Ketiga*, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Didukung dengan adanya keterlibatan aktif dalam inisiatif global terkait lingkungan dan perubahan iklim, berupa proses pengelolaan limbah pabrik rokok. *Keempat*, menyikapi isu perubahan iklim global dan berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Didukung dengan adanya partisipasi dalam program-program sertifikasi lingkungan atau penghargaan keberlanjutan, berupa keikutsertaan masyarakat dalam seminar peduli lingkungan dan penanaman pohon.

4. Rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di suatu wilayah

Upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dilakukan dengan memperkuat upaya mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam merupakan serangkaian langkah preventif dan penyiapan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Belakangan ini, mitigasi bencana telah menjadi topik penting dalam diskusi dan perbincangan baik di tingkat nasional maupun internasional karena meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan memperkuat upaya mitigasi bencana, diharapkan dapat mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana alam serta melindungi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang hijau

Saat ini Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 42.516 Ha, dimana sebagian besar digunakan untuk perumahan dengan luas 21.925 Ha, sebagai tempat aktivitas sosial manusia. Sementara itu, sektor penghijauan seperti hutan dan sawah mencakup 20.591 Ha. Potensi pembangunan oleh pihak eksternal menjadi hal yang penting karena sulit untuk dipantau dan dikontrol sepenuhnya. Hal ini menyebabkan masih adanya praktik pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku hingga saat ini, yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak optimal.

Intrepretasi Solusi Pemecahan Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kudus

Penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai solusi dan alternatif dalam mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu alternatif yang dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi adalah dengan memberikan kewenangan kepada daerah dalam konteks otonomi khusus. Beberapa kewenangan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi lokal, dengan diversifikasi ekonomi lokal mengacu pada upaya untuk mengembangkan beragam sektor ekonomi di suatu wilayah, bukan hanya bergantung pada satu sektor utama. Dengan mendorong diversifikasi ekonomi, daerah dapat menciptakan lebih banyak peluang pendapatan bagi masyarakat. Misalnya, selain sektor pertanian yang mungkin menjadi sektor utama, daerah dapat mengembangkan sektor industri, pariwisata, perdagangan, atau jasa lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan pasar.
2. Program magang dan pelatihan kerja, dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan program magang dan pelatihan kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi para calon tenaga kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dengan adanya program magang dan pelatihan, para pencari kerja dapat lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan daya saing mereka.
3. Aksesibilitas masyarakat, dengan memperkuat sistem transportasi dan infrastruktur akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Dengan adanya transportasi yang baik dan infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pusat kesehatan, sekolah, kantor pemerintah, dan tempat-tempat penting lainnya. Hal ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari.
4. Mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi lokal akan meningkatkan daya saing daerah. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk baru, proses produksi yang lebih efisien, atau penyediaan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya inovasi, daerah dapat memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah bagi produk dan layanan yang dihasilkan.
5. Transparansi dan keterbukaan, dengan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembangunan di Kabupaten Kudus menghadapi tantangan seperti rendahnya pendapatan, kurangnya pekerjaan, kualitas pelayanan publik yang buruk, rendahnya daya saing, dan penerapan good governance yang lemah. Untuk mengatasi ini, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah, serta fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan, partisipasi, dan kemandirian daerah.

Kemudian, pembangunan di Kabupaten Kudus menghadapi beberapa isu strategis internasional yang signifikan, termasuk dampak Pandemi Covid-19, tantangan Sustainable Development Goals (SDGs), ancaman krisis ekonomi global, penerapan ekonomi ramah lingkungan, kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang hijau. Isu-isu ini memerlukan pendekatan komprehensif dan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus, penting bagi pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada daerah. Solusi yang dapat diterapkan meliputi: diversifikasi ekonomi lokal, program magang dan pelatihan kerja, peningkatan aksesibilitas melalui infrastruktur yang baik, mendorong inovasi di sektor ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah.

Rekomendasi peneliti untuk kajian riset selanjutnya yakni penelitian untuk mengidentifikasi potensi inovasi di berbagai sektor ekonomi lokal di Kabupaten Kudus. Hal ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong atau menghambat inovasi, serta strategi yang dapat diadopsi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Aini, D., Farhaini, A., & Putra, B. K. (2023). Community Participation in Improving Health in Remote Areas: A Literature Review. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 6(2), 27–43.
- Alfaisal, R., Hashim, H., & Azizan, U. H. (2024). Metaverse System Adoption in Education: A Systematic Literature Review. *Journal of Computers in Education*, 11(1), 259–303.
- Alfaris, M. R. (2024). Analisis Fenomena Penunggakan Gaji Karyawan di Indonesia: Perspektif Randall Collins. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 169–179.
- Alfaris, M. R. (2024b). JUDI ONLINE DI KALANGAN MAMAH MUDA PERSPEKTIF AL-QUR'AN; TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(2), 189–203.
- Alfaris, M. R., & Rosyid, M. (2024). Fenomena Pernikahan Dini pada Masyarakat Adat: Perspektif HAM. *Literasi Hukum*, 8(2), 33–42.
- Amri, D. R., & Lessy, Z. (2024). Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5655–5670.
- Andris, A. M. N., Ballo, F. W., & Tiwu, M. I. H. (2024). Dampak Pembangunan PLTU Ropa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 34–44.
- Ardiansyah, N., Adilansyah, A., Hendra, H., Junaidin, J., & Rizkiani, F. R. F. (2024). Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 803–810.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis Dari Sentralisasi Ke Desentralisasi. *Polyscopia*, 1(2), 36–42.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16.
- Aziz, S., & Najicha, F. U. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 11–21.
- Azra, S., & Afif, Y. K. (2024). Analisis Strategi Program Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 6(2), 105–119.
- Candra, A., Afriani, K., Ansori, A., Absi, W. Z., & Jauhari, J. (2024). Pembangunan Hukum Dagang Menuju Indonesia Emas. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(1), 1–10.
- Desembrianita, E., Wisang, P. N., Harsono, I., Mahmudin, T., & Syofya, H. (2024). Ecotourism: Super Priority Tourism Development and Preservation Strategy in Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1619–1627.
- Dewi, E. P., & Ramadhan, S. (2024). Bisnis Muda Yang Berkelanjutan: Mendukung Pertumbuhan Keberlanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIA LK (PESAT)*, 3(1), 141–145.
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Gaol, H. S. L. (2023). Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 9(1), 156–164.
- Dienes, L. (2023). Regional Economic Development. In *The Soviet Economy* (pp. 218–268). Routledge.
- Efendi, M. N. (2023). Grand Design of Village-Based Islamic Economic Development Planning in an Effort to Achieve Sustainable Development of Indonesia Gold 2045 in Ngancar Village, Plaosan district, Magetan Regency. *Proceedings of Femfest International Conference on Economics, Management, and Business*, 3(2), 199–210.
- Fauziah, F., Sujianto, S., & Adianto, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2429–2445.
- Giroth, I. G., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*,

- 2(1), 212–223.
- Hasibuan, M. R. R., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Pengembangan Ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 472–477.
- Henderson, K., & Loreau, M. (2023). A model of Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities in Promoting Human Well-Being and Environmental Sustainability. *Ecological Modelling*, 47(5), 164–173.
- Hickmann, T., Biermann, F., Spinazzola, M., Ballard, C., Bogers, M., Forestier, O., Kalfagianni, A., Kim, R. E., Montesano, F. S., & Peek, T. (2023). Success Factors of Global Goal-Setting for Sustainable Development: Learning from the Millennium Development Goals. *Sustainable Development*, 31(3), 1214–1225.
- Hidayat, A., & Husni, V. (2022). Peran Geopark Rinjani Lombok Sebagai Pilar Pariwisata Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 581–596.
- Kuzmak, O. I., & Kuzmak, O. M. (2023). Transformational Processes of Ensuring Sustainable Urban Development: The Realities of Ukraine. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1254(1), 12079–12088.
- Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran Inovasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Menuju Visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 114–129.
- Lestianto, H., Siswanto, S., & Efendi, R. (2022). Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Operasi Human Assistance And Disaster Relief (Ha/Dr) Kri Dr. Soeharso-990 di Regional Asia Tenggara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1045–1056.
- Madubun, J. (2023). Public Services in Island Sub-Districts: Towards Geography-Based Governance. *Australian Journal of Public Administration*, 5(2), 111–123.
- Mangukiya, R. D., & Sklarew, D. M. (2023). Analyzing three pillars of sustainable development goals at sub-national scales within the USA. *World Development Sustainability*, 2(2), 1–30.
- Meilina, R. Y., & Oktavian, R. (2022). Strategi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 63–74.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20.
- Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (2018).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Ningsih, W. P., & Alaydrus, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 157–165.
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(2), 288–298.
- Pelengkahu, M. R., & Satria, N. (2023). The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia. *Administrative and Environmental Law Review*, 4(2), 127–138.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (2019).
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Local Government in the Dynamics of the Community Economy: A Legal and Sociological Perspective. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 1–28.
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P. A., & Najmi, M. S. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(9), 431–439.
- Putri, M. H. C., & Putri, N. T. (2022). Local Economic Development sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 41–53.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Rumkabu, E. (2022). Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua. *Jurnal*

- Ilmiah Hubungan Internasional*, 2(2), 39–55.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(2), 59–73.
- sofyan Nasution, A. I., Harahap, I., & Harahap, M. I. (2024). Analisis Dampak Investasi Dan Konsumsi Pada Sektor Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2390–2397.
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23.
- Song, J., & Jang, C. (2023). Unpacking the Sustainable Development Goals (SDGs) Interlinkages: A Semantic Network Analysis of the SDGs Targets. *Sustainable Development*, 31(4), 2784–2796.
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16–24.
- Taiwo, R., Shaban, I. A., & Zayed, T. (2023). Development of Sustainable Water Infrastructure: A Proper Understanding of Water Pipe Failure. *Journal of Cleaner Production*, 39(8), 136–143.
- Uksan, A. (2023). Analysis of Potential Conflict and Peaceful Solutions as Impact of Strategic Environmental Developments and its Implications on National Security. *International Journal of Social Science*, 3(1), 51–58.
- Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(3), 129–144.